

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *peraturan.bpk.go.id*. [Diakses tanggal 22 April 2021].
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. *bpjs-kesehatan.go.id*. [Diakses tanggal 22 April 2021].
- Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. *bpjs-kesehatan.go.id*. [Diakses tanggal 22 April 2021].
- Megawati, L., Pratiwi, R.D. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Pengembalian Berkas Persyaratan Klaim BPJS Pasien Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jkesvo (Jurnal Kesehatan Vokasional)*. 1 (1): 36-43.
- Arikusnadi, N.W., Sudirman, Kadri, A. (2020). Studi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Kesehatan Di RUMKIT Bhayangkara Palu. *Jurnal Kolaboratif SAINS*. 1 (1): 240-250.
- Oktamianiza, Rahmadhani, Yulia, Y., Putri, H.M. (2021). Literatur Riview Tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Perkam dan Informasi Kesehatan IMELDA*. 6 (1): 83-90.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. *peraturan.bpk.go.id*. [Diakses tanggal 22 April 2021].
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. *hukor.kemkes.go.id*. [Diakses tanggal 08 Mei 2021].
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. *hukor.kemkes.go.id*. [Diakses tanggal 08 Mei 2021].

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. *ngada.org*. [Diakses tanggal 11 Juli 2021].

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *peraturan.bpk.go.id*. [Diakses tanggal 11 Juli 2021].

Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim. *bpjs-kesehatan.go.id*. [Diakses tanggal 26 Juni 2021].

Nurhidayah, Y. (2013). Analisis Faktor Penyebab Dan Upaya Penyelesaian Masalah Duplikasi Nomor Rekam Medis Di UPT Puskesmas Purworejo. *Tugas Akhir*. Universitas Gadjah Mada.

Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Indawati, L. (2019). Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. 7(2):105-113.

Irmawati, Kristijono, A., Susanto, E., dan Belia, Y. (2018). Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasien Rawat Inap Ditinjau Dari Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Di RSUD R.A Kartini Jepara. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. 1(1): 45-51.

Herman, L.N., Farlinda, S., Ardianto, E.T., Abdurachman, A.S. (2020). Tinjauan Keterlambatan Klaim Berkas BPJS Rawat Inap Di RSUP Dr. Hasan Sadikin. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan (J-REMI)*. 1(4): 575-581.

Kusumawati, A.N., Pujiyanto. (2020). Faktor – Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Inap di RSUD Koja tahun 2018. *Cermin Dunia Kedokteran (CDK)*. 47(1): 25-28.

- Amir, I.B., Suhadi., Harun, H. (2020). Identifikasi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)*. 1(2): 61-70.
- Supriadi, Rosania, S. (2019). Tinjauan Berkas Klaim Tertunda Pasien JKN Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018. *Jurnal Vokasi Indonesia*. 7(2):19-26.
- Arikusnadi, N.W., Sudirman, Kadri, A. (2020). Studi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Kesehatan Di RUMKIT Bhayangkara Palu. *Jurnal Kolaboratif SAINS*. 1 (1): 240-250.
- Nabila, S.F., Santi, M.W., Deharja, A. (2020). Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim Akibat Koding Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan (J-REMI)*. 1 (4):519-528.
- Artanto EP., A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit (ARSI)*. 4 (2): 122-134.
- Manurung, J., Munthe, S.A., Bangun, H.A., Putri, N. (2020). Analisis *Pendingclaim* pada Pasien BPJS Kesehatan Di RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam Tahun 2018. *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)*. 2 (2): 11-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)*. peraturan.bpk.go.id. [Diakses tanggal 06 Juli 2021].
- Irawati, R., Carrollina, D.A. (2017). Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Operator Pada PT Giken Precision Indonesia. *Jurnal Inovasi dan Bisnis*. 5 (1): 51-58.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. www.kemhan.go.id. [Diakses tanggal 08 Juli 2021].

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 tahun 2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. *ika-fkunpad.org*. [Diakses tanggal 11 Juli 2021].

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. *bppskmk.kemkes.go id*. [Diakses tanggal 03 Agustus 2021].

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. *pelayanan.jakarta.go.id*. [Diakses tanggal 11 Juli 2021].

Nuraini, N., Wijayanti, R.A., Putri, F., Alfiansyah, G., Deharja, A., Santi, M.W. (2019). Optimalisasi Manajemen Penanganan Klaim Pending Pasien BPJS Rawat Inap Di Rumah Sakit Citra Husada Jember. *Jurnal Kesmas Indonesia*. 11 (1): 24-35.

Karsintapura, N.A., Zahroh ZA., Endang N.P, MG.Wi.. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Jasa Pengobatan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada Puskesmas Bandar Kedung Mulyo Kab.Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 22(1): 1-9.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. *peraturan.bpk.go.id*. [Diakses tanggal 24 Oktober 2021].

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. <http://hukor.kemkes.go.id/>. [Diakses tanggal 24 Oktober 2021].